

ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PALEMBANG

Rodhiah Patutie¹, Sitti Murniati²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka¹

Program Studi Akuntansi, STIE Wira Bhakti Makassar²

E-mail: rodhiahpatutie@gmail.com¹, murnhie89@gmail.com²

Abstrak: Terlaksananya pemerintahan yang baik adalah wujud dari apresiasi terhadap tujuan dari mekanisme organisasi sektor publik dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Pemahaman ini membutuhkan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas, terukur dan sah supaya pelaksanaan kegiatan organisasi dapat terlaksana secara efektif, efisien, bersih dari KKN dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu manfaat akuntabilitas sektor publik adalah sebagai dasar penganggaran. Proses penyusunan anggaran pada hakekatnya adalah proses pendefinisian peran dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan anggaran yang akan dicapai. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akuntansi pertanggungjawaban pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) struktur organisasi telah berjalan dengan baik dan telah menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing; 2) Penilaian kinerja telah dilakukan dengan baik melalui aplikasi e-kinerja; 3) Penyusunan Anggaran telah dilaksanakan dan melibatkan setiap unit penanggungjawab. 4) Belum menerapkan penggolongan biaya pertanggungjawaban berupa biaya-biaya yang terkendalik dan tidak terkendalik; dan 5) Laporan pertanggungjawaban telah dilaporkan kepada pimpinan secara berkala.

Kata kunci: Akuntansi pertanggungjawaban, Anggaran, Pusat Pertanggungjawaban

Abstract: The implementation of good governance was a manifestation of appreciation for the objectives of public sector organizational mechanisms in order to fulfill the desires of the community to achieve the goals and ideals of the nation. This understanding required the development and implementation of an accountability system that was appropriate, clear, measurable and valid so that the implementation of organizational activities can be carried out effectively, efficiently, free from Corruption and Corruption and can be accounted for. One of the benefits of public sector accountability was as a basis for budgeting. The budget preparation process was essentially the process of defining roles in achieving the goals and implementation of the budget to be achieved. The aim of this research was to analyze accountability accounting at the Palembang Class I Agricultural Quarantine Center. The method that researchers used in this research is descriptive qualitative method. The research resulted show that: 1) the organizational structure had been running well and has carried out its respective main tasks and functions; 2) Performance assessment had been carried out properly through the e-performance application; 3) Budget preparation had been carried out and involves each responsible unit. 4) Not yet implementing the classification of responsible costs in the form of controllable and uncontrollable costs; and 5) Accountability reports had been reported to the leadership periodically.

Keywords: Accounting of Responsibility, Budgeting, Central of Responsibility

PENDAHULUAN

Setiap organisasi yang didirikan mempunyai tujuan tertentu, tidak terkecuali pada organisasi publik. Untuk mencapainya diperlukan strategi dalam bentuk program dan kegiatan serta aktifitas. Salah satu tanggung jawab organisasi adalah memerlukan sistem pengendalian manajemen yang menjamin pelaksanaan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuan dari sistem pengendalian juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilaksanakan (Anggono, 2022:152).

Sistem pengendalian sektor publik berfokus pada bagaimana strategi organisasi diterapkan secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem pengendalian harus didukung oleh perangkat lain berupa struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan lingkungan pendukung. Struktur organisasi harus sesuai dengan rencana sistem pengendalian manajemen. Hal ini dapat berjalan dengan baik jika struktur organisasi tertata dengan rapi, dilihat dari cara mendelegasikan otoritas dan responsibilitas pada entitas. (Anggono, 2022:152).

Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk melayani publik. Menurut perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Rahasia, dan Bebas Nepotisme, salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan adalah asas tanggung jawab. Pengertian asas tanggung jawab adalah bahwa setiap tindakan dan hasil penyelenggaraan negara harus bertanggung jawab kepada publik atau kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Anggono, 2022:153).

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode yang paling umum digunakan karena dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban suatu organisasi dapat mencatat semua aktivitasnya dan kemudian mengetahui bagian/unit mana yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut dan bagian/unit mana yang tidak bekerja secara efektif dan efisien. Akuntabilitas memungkinkan manajer untuk lebih efektif mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan mereka tanpa mengendalikan semua operasi organisasi secara langsung. Akuntansi pertanggungjawaban juga harus dievaluasi untuk memastikan berjalan dengan baik, sehingga manajemen dapat dengan mudah mengalokasikan biaya yang dikeluarkan kepada pengawas pusat pertanggungjawaban. (Wandari & Sujana, 2021).

Mulyadi dalam Hananingrum & Pravitarsi (2022) menjelaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban memiliki lima syarat yang harus dipenuhi supaya pelaksanaannya bisa terlaksana dengan efektif dan efisien. Syarat-syarat tersebut, yaitu :

1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi harus sesuai dengan rancangan sistem pengendalian manajemen, karena fokus sistem pengendalian manajemen terletak pada unit-unit organisasi yang bertindak sebagai pusat tanggung jawab. Pusat-pusat tanggung jawab ini menjadi dasar perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja (Anggono, 2022:152). Idealnya, pusat pertanggungjawaban menyerupai struktur organisasi yang akan mendistribusikan beban dan tanggung jawab yang berbeda untuk setiap unit organisasi. (Anggono, 2022:157).

2) Penganggaran

Proses penganggaran pada hakekatnya merupakan proses pendefinisian peran (role setting) dengan tujuan pencapaian target dalam usaha pencapaian target. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian aktivitas. Anggaran berperan mengkoordinasikan rencana aksi yang disusun oleh masing-masing Pusat Pertanggungjawaban. Penganggaran mencakup fungsi-fungsi seperti perencanaan, komunikasi, motivasi dan kontrol (Kholmi, 2019:116). Oleh karena itu, anggaran mencakup perhitungan liabilitas yang mengukur nilai sumber daya yang dibuat selama periode keuangan. Dalam penyusunan anggaran, akuntabilitas berperan sebagai

penyalur peran kepada pimpinan yang telah diberi peran dalam mencapai tujuan. (Anggono, 2022:158-159).

3) Klasifikasi Biaya

Tujuan klasifikasi biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban, yaitu agar akuntansi pertanggungjawaban bisa diterapkan maka seluruh biaya harus dapat ditentukan mana yang bersifat terkendalikan dan mana biaya yang tidak terkendalikan (Narsa, 2019:9.11)

4) Klasifikasi dan Kode Rekening

Semua kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan atau pengeluaran dicatat oleh setiap tingkatan manajemen, oleh karena itu semua pengeluaran harus diklasifikasikan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkat manajemen adalah pusat biaya dan menanggung biaya yang dihasilkan, yang dibagi menjadi biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Kode akun digunakan untuk mengklasifikasikan akun di neraca dan laporan laba rugi (Narsa, 2019:9.11).

5) Sistem Pelaporan Biaya

Laporan pertanggungjawaban dari tiap-tiap unit pertanggungjawaban akan dibuat secara periodik. Pengeluaran biaya direkapitulasi pada setiap awal bulan berdasarkan total biaya bulan lalu dan tercatat pada kartu biaya. Berdasarkan rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjaawaban biaya. Isi laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan level manajemen. (Narsa, 2019:9.12). Pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu *cost center*, *revenue center*, *provit center* dan *investement center* (Anggono, 2022:155).

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Pusat adalah contoh dari pusat pertanggungjawaban. Pusat akuntabilitas ini kemudian dibagi menjadi beberapa unit pelaksana teknis, antara lain, balai besar, balai, dan stasiun. Setiap pusat akuntabilitas harus menganggarkan rencana kerja dan referensi untuk evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja diperlukan secara internal dalam organisasi karena digunakan sebagai acuan dan alat evaluasi manajemen atas kinerja organisasi selama periode tertentu (Teruna & Noor, 2021).

Sistem pengendalian manajemen menitikberatkan pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban, yaitu dasar perencanaan, pemantauan dan evaluasi proses. Evaluasi kinerja menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh organisasi publik. Evaluasi kinerja dapat menggambarkan sejauh mana pencapaian tujuan, sasaran dan pelaksanaan kegiatan atau program yang sedang berjalan di organisasi publik. Di samping itu, penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menyelenggarakan program dengan lebih baik (Aripin & Negara, 2021).

Masyarakat Indonesia menginginkan agar pemerintah menggunakan sumber daya negara secara lebih bijak, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Apabila akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan tidak dilakukan dengan benar, maka bisa terjadi penyimpangan anggaran yang tidak disadari. Akibatnya, akan terjadi inefisiensi anggaran yang berdampak pada kerugian negara. Selain itu, dengan tidak diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban akan membuat masyarakat tidak mempercayai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Masyarakat mengharapkan pemerintah dapat terbuka mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dengan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban, diharapkan dapat mengontrol kinerja anggaran dan organisasi agar tidak terjadi penyimpangan di luar tujuan organisasi (Hananingrum & Pravitasari, 2022).

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Karantina Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, anggaran digunakan sebagai alat yang dapat menggambarkan rencana kerja yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kinerja. Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, setiap penanggung jawab kegiatan wajib membuat

laporan secara periodik sehingga Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) sebagai kepala kantor bisa melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap anggaran yang dikeluarkan.

Penyusunan anggaran pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang dilakukan berdasarkan unit-unit penanggungjawab kegiatan. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dapat diketahui perbandingan antara realisasi dengan anggarannya, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dianalisa dan dicarikan solusinya (Narsa, 2019:9.10). Proses penganggaran mengacu pada TOR (*Term of Reference*) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada setiap pelaksanaan kegiatan dan merangkum semua yang ada di bagian keuangan dan pelaporan..

Pada penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana akuntansi pertanggungjawaban di Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang. Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi inti permasalahan penulis adalah penerapan akuntansi pertanggungjawaban di Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena dalam melakukan penelitian dibutuhkan perspektif dari pihak-pihak yang terkait.

Salah satu alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gadget untuk memudahkan peneliti dalam mengambil gambar sebagai dokumentasi dan sebagai alat *recorder* pernyataan responden pada saat *interview*. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha BKP Kelas I Palembang dan juga dilakukan observasi secara langsung pada unit-unit pertanggungjawaban. Sumber informasi berupa dokumen diambil dari dokumen pusat pertanggungjawaban dan digunakan sebagai data sekunder. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Pengamatan

Pengamatan dilakukan dengan menelaah permasalahan yang dihadapi di lapangan dan proses kerja perhitungan pertanggungjawaban untuk mendapatkan sumber data sebagai objek masukan yang akan diamati.

b. Wawancara

Data dikumpulkan lewat wawancara secara langsung antara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggungjawab di setiap bagian pusat pertanggungjawaban yang ada di Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang dan para pegawai tentang penilaian kinerja pusat biaya.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berasal dari pendokumentasian hal-hal terkait di Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang pada unit-unit pertanggungjawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang merupakan salah satu pusat pertanggungjawaban instansi vertikal di bawah Badan Karantina Pertanian – Kementerian Pertanian. Akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengendalian biaya. Berdasarkan gambaran struktur organisasi pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, setiap penanggung jawab kegiatan telah mengetahui tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing dan sudah melakukan tupoksi dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan

Perbandingan antara teori yang ada dengan data yang diperoleh di Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban dianggap cukup memadai. Dilihat dari:

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian memiliki Badan Karantina Pertanian sebagai entitas eselon I. Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Tugas operasionalnya meliputi karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati (BKP Kelas I Palembang, Laporan Tahunan, 2022:1).

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang sebagai pusat biaya yang dipimpin oleh Kepala Balai (Eselon III-A), dibantu oleh Subbagian Tata Usaha, Sub Koordinator Karantina Hewan, Sub Koordinator Karantina Tumbuhan dan Sub Koordinator Pengawasan dan Penindakan serta bertanggungjawab secara langsung kepada kelompok jabatan fungsional karantina tumbuhan dan karantina hewan. Masing-masing bidang tersebut akan melaporkan hasil pelaporan biaya secara periodik ke unit pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagai bukti dan eviden dari kegiatan yang dilaksanakan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hananingrum, 2022) Dinas KBPPA sebagai pusat biaya yang diketuai oleh seorang kepala dinas dan kemudian membawahi Sekertariat dan tiga bidang yakni Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh (Tambariki, et al, 2022) menyebutkan bahwa struktur organisasi dinas pendidikan kabupaten minahasa terdiri dari kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi yang dibantu oleh sekretaris dan kepala jabatan fungsional. Kemudian jenjang dibawahnya terdiri dari kepala-kepala bidang yang membawahi beberapa subbidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

2. Anggaran

Anggaran diperlukan untuk menentukan kebutuhan keuangan masing-masing bidang dalam pembiayaan program yang dilaksanakan (Hananingrum & Pravitasari, 2022). Anggaran merupakan gambaran dari perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Kepala BKP Kelas I Palembang selama satu periode tahun anggaran. Proses penyusunan anggaran pada BKP Kelas I Palembang adalah dengan menggabungkan dan merekapitulasi anggaran yang dibutuhkan. Sebelum memasuki tahun anggaran, dibuat rapat penyusunan anggaran dengan melibatkan setiap penanggung jawab kegiatan untuk membahas perencanaan anggaran tahun depan yang dirangkum dan diinput oleh operator RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) ke dalam aplikasi e-proposal dan diusulkan ke Eselon 1 Badan Karantina Pertanian untuk diverifikasi dan direview. Setiap penanggung jawab kegiatan wajib menyerahkan TOR (Term of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) untuk setiap rencana kegiatan yang akan dianggarkan. Selanjutnya Menteri Keuangan akan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang. Pengesahan DIPA Petikan akan diterbitkan sebelum memasuki tahun anggaran selanjutnya. Setelah DIPA Petikan terbit, pelaksanaan kegiatan sudah bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (Hananingrum & Pravitasari, 2022).

Penyusunan anggaran pada BKP Kelas I Palembang telah memenuhi sistem akuntansi pertanggungjawaban, karena dalam proses menyusun anggaran setiap penanggung jawab kegiatan ikut berperan di dalamnya. Masing-masing penanggungjawab membuat TOR dan RAB untuk setiap kegiatan yang akan dianggarkan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wandari & Sujana, 2021 yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran dilaksanakan oleh bagian-bagian yang terkait dalam rangka pelaksanaan program kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rumah sakit. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambariki, et al, 2022 yang menyebutkan bahwa penyusunan anggaran melibatkan unit kerja sesuai bidang yang ada di Kantor Dinas Pendidikan dalam menyusun anggaran berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan.

3. Penggolongan Biaya

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang belum menerapkan penggolongan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hananingrum & Pravitasari, 2022 menyebutkan bahwa pada Dinas KBPPA belum menerapkan penggolongan biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan.

Penggolongan biaya pada instansi pemerintah digolongkan berdasarkan biaya pegawai, biaya barang dan biaya modal. Menurut penulis penyebab belum digolongkan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali pada instansi pemerintah adalah karena belum ada aturan lebih rinci terkait penggolongan biaya ini. Harus ada aturan agar terjadinya keseragaman dan keharusan pada instansi pemerintah untuk menerapkan penggolongan biaya ini. Selama ini baru berdasarkan teori dan belum ada aturan yang mewajibkan.

4. Sistem Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang sudah melaksanakan sistem akuntansi pengelompokan dan pemberian kode rekening yang dapat dilihat pada rincian kertas kerja satker. Dalam rincian kertas kerja satker telah merincikan program dan kegiatan masing-masing bidang beserta MAK (Mata Anggaran Kegiatan). Dengan penerapan MAK dapat dengan mudah mengetahui pusat pertanggungjawaban siapa yang bertanggungjawab terhadap biaya tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hananingrum & Pravitasari (2022) yang menjelaskan bahwa pengelompokan kode rekening di kantor KBPPA dikelompokkan sesuai dengan program dan fungsi masing-masing bidang. Penelitian yang dilakukan oleh Wandari & Sujana (2021) juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa RSUD Kabupaten Buleleng, Bali telah melakukan pengklasifikasian kode rekening.

5. Sistem Pelaporan Biaya

Pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, sistem pelaporan biaya telah berjalan dengan baik. Setiap selesai melaksanakan kegiatan, masing-masing penanggung jawab kegiatan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya dan akan dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran kemudian akan dilakukan verifikasi oleh verifikator keuangan dan selanjutnya diotorisasi oleh pejabat pembuat komitmen dan dilaporkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang merangkap sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar).

Sistem pelaporan biaya sudah terpusat pada aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Aplikasi SAKTI telah mencakup beberapa unit pertanggungjawaban, seperti kuasa pengguna anggaran, PPSPM, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan PNPB, Verifikator Keuangan, Petugas SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang

Milik Negara) dan Persediaan serta Petugas SAI (Sistem Akuntansi Instansi). Pelaporan biaya dilakukan secara berkala, yaitu setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Pengelola keuangan membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran sebagai pertanggungjawaban biaya. Jika pelaporan biaya menunjukkan bahwa realisasi anggaran masih kurang, maka akan dilakukan evaluasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan target yang telah direncanakan. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Teruna & Noor (2021) yang menyebutkan bahwa dari hasil penelitian pada Kantor Kecamatan Bontoa telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran dengan cukup memadai.

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja di Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang menggunakan aplikasi e-kinerja dengan membuat indikator kinerja utama pada setiap awal tahun. Pelaporan pertanggungjawaban dan penilaian dilakukan setiap bulan, triwulan dan tahunan. Penilaian kinerja yang dilakukan setiap bulan dan triwulan yaitu mengevaluasi output hasil kinerja pegawai, sedangkan untuk penilaian tahunan mengevaluasi target dan pencapaian tahunan serta perilaku pegawai. Penilaian ini digunakan sebagai pengukuran dan pencapaian kerja serta sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja. Penilaian kinerja ini juga dijadikan dasar untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Kendala Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Permasalahan yang terjadi dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban adalah sering melakukan revisi anggaran sehingga berpengaruh terhadap nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang rendah. Masing-masing penanggung jawab kegiatan sebaiknya merencanakan secara matang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga tidak terjadi keseringan dalam melakukan revisi anggaran.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang terdapat pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang sudah terdapat pusat-pusat pertanggungjawaban dan sudah dapat desentralisasi wewenang didalamnya sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antara wewenang dan tanggungjawab serta dapat bertanggungjawab atas aktivitas masing-masing pusat pertanggungjawaban. Struktur organisasinya juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 47 Tahun 2020 tentang Susunan Tata Kerja UPT Karantina Pertanian.
2. Proses penyusunan anggaran pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang mengikutsertakan masing-masing penanggungjawab anggaran. Dengan demikian para penanggungjawab ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran, sehingga merasa bertanggungjawab dengan anggaran yang mereka susun sesuai dengan TOR dan RAB masing-masing kegiatan;
3. Penilaian kinerja pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang telah dilakukan secara berkala, yaitu bulanan, triwulan dan tahunan. Masing-masing pegawai telah rutin mengupload capaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama sehingga pimpinan dapat mengontrol dan mengevaluasi pencapaian kinerja pegawai serta sebagai dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.
4. Penggolongan biaya pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang tidak terdapat pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Tetapi berdasarkan pemisahan belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
5. Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang sudah melaksanakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Dengan penerapan MAK (Mata Anggaran Kegiatan), biaya yang terjadi langsung dapat teridentifikasi kepada pusat biaya yang bersangkutan.

SARAN

Dalam melakukan perencanaan biaya yang akan dilakukan sebaiknya direncanakan dengan matang dan diperhitungkan dengan baik, agar anggaran yang disusun tepat guna tepat sasaran sehingga tidak terlalu banyak dalam melakukan revisi anggaran. Perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi sebagai *team work* agar kegiatan dan anggaran dapat terlaksana sebagaimana mestinya secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, A. (2022). *Akuntansi Manajemen pada Entitas Publik*. Penerbit Adab
- Aripin, Z., & Negara, M.R.P (2021). *Akuntansi Manajemen*. Deepublish
- Hananingrum, N., & Pravitasari, D. (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajerial Pusat Biaya pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 4(1)
- Kholmi, M. (2019). *Akuntansi Manajemen*. UMMPress
- Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, *Laporan Tahunan 2022* (diakses di <https://bkplpalembang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument?arsip=3758>)
- Narsa, I.M. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Universitas Terbuka
- Purba, S., Saragih, R., & Sihite, M.P.P. (2022). Implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya pada Rumah Sakit Umum Wilayah Tarutung. *Jurnal Akuntansi*. 14(1).161-171.
- Samryn, L.M. (2017). *Akuntansi Manajemen: Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi & Investasi*. PrenadaMedia
- Sulastri. (2020). Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai pengendalian anggaran pada dinas pekerjaan umum kabupaten enrekang. *Akuntansi*, 8(5), 55.
- Tambariki, P., Sumual, F., & Sumampouw, O. (2022). Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 3233–3246.
- Teruna, A.Y., & Noor, M.Y. (2021). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya. *Cross-Border*, 4 (2), 780-795.
- Wandari, N.K.H.A., & Sujana, E. (2021). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya pada RSUD Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) UNDIKSHA*, 12(1).